

Pendidikan: Syarat Multak Manusia Berkualitas

“Perempuan kalau bukan sebagai pemimpin, sebagai orang yang pandai”. (Roehana Koedoes 1884-1972)

Demikian seorang tokoh pendidik perempuan Roehana Koedoes dari Minangkabau dalam gerakan pendidikan untuk perempuan di abad 18 seiring dengan perjuangan RA. Kartini di tanah Jawa. Roehana menekankan, untuk menemukan kemerdekaannya, syarat bagi perempuan adalah sebagai orang yang pandai. Atas ucapannya ini Roehana mendirikan Sekolah Perempuan di teras rumahnya sendiri yang mendidik perempuan-perempuan di kampungnya untuk belajar membaca dan menulis serta membuat kerajinan tangan untuk dijual dan pemberdayaan ekonomi mereka. Awalnya hanya dari kebiasaan Roehana membaca buku-buku dan koran dengan suara yang nyaring lagi lantang, namun siapa sangka kegemaran ini justru yang membuat lingkungan sekitarnya sadar bahwa Roehana sangat berbakat untuk menjadi guru. Berangsur para tetangganya mulai tertarik belajar membaca dan menulis agar bisa membaca sendiri cerita yang dibacakan Roehana. Timbullah gagasan Roehana mendirikan sekolah di rumah, teras disulap menjadi tempat belajar sederhana, sedangkan ayah Roehana membantu pengadaan alat tulis yang dibagikan secara gratis. Cukup beralas tikar dan duduk bersila, pelajaran membaca dan menulis dimulai dengan Roehana sebagai guru. Kegiatan belajar-mengajar yang berlangsung di rumah Roehana semakin riuh, dari anak-anak

hingga para ibu muda terlibat proses pendidikan yang menggembirakan. Roehana mulai memperkaya materi pengajaran. Tak hanya membaca dan menulis saja, tapi juga pelajaran berhitung. Nenek Roehana, Tuo Sarimin, turut andil dengan memberikan pelajaran keterampilan menyulam, sementara Tuo Sini, adik neneknya yang selain pintar mendongeng juga mengajar anyam-menganyam. Gerakan pendidikan untuk perempuan yang dilakukan Roehana ini menghasilkan perempuan-perempuan yang berdaya dalam menjalankan hidupnya. Mereka tidak lagi buta huruf dan memiliki penghasilan sendiri dari produksi anyam-anyaman dan tenunan sunting khas Melayu yang distribusinya bahkan sampai ke luar negeri.

Roehana Koedoes dan RA. Kartini menyadari bahwa syarat manusia berkualitas haruslah berawal dari sekolah atau pendidikan. Dan karena kualitas itulah seseorang bisa meraih kemerdekaan atau kebebasannya, jauh dari rasa takut dan diperlakukan tidak adil. Dalam masa pra kemerdekaan atau era kolonial dimana manusia Indonesia di kelas-kelas paling bawah tidak diperbolehkan sekolah, banyak tokoh-tokoh pendidik yang membangun sekolah alternatif dengan tujuan jangka panjang yaitu pembebasan manusia dari ketidakadilan dan mencapai kemerdekaan bangsa. Pada masa ini Ki Hadjar Dewantara juga melakukan perlawanan kolonial melalui gerakan pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Di Sumatera Barat Mohammad Sjafei mendirikan INS Kayu Tanam. Kedua tokoh itu menanamkan pengaruh yang kuat dalam pendidikan Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan.

Lalu bagaimana perkembangan pendidikan saat ini? Apakah semangat mendidik itu berhasil diteruskan pada bangsa yang sudah merdeka kini? Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional mengatakan, "Saat ini, sedikitnya 8,3 juta orang Indonesia masih buta aksara atau tidak bisa menulis dan membaca huruf latin. Lebih dari separuhnya perempuan dan di dominasi usia 45 tahun

ke atas - Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional." (www.waspada.co.id).

Data yang disebutkan oleh Hamid Muhammad ini membentangkan persoalan dasar dalam sektor pendidikan yaitu masih banyaknya jumlah buta huruf secara umum, dan secara khusus fakta memperlihatkan jumlahnya lebih banyak perempuan.

Fakta di atas sedikit membuka mata kita bahwa kenyataan orang Indonesia yang masih belum bisa membaca dan menulis ternyata banyak sekali. Dari fakta yang sedikit itu, Jurnal Perempuan kali ini akan membeberkan fakta-fakta lain yang lebih banyak lagi seputar persoalan pendidikan di Indonesia dengan sejumlah tantangannya. Salah satunya persoalan korupsi, bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan untuk pendidikan. Hingga semester II-2007 ada enam bentuk dugaan penyimpangan di antaranya pemborosan, kerugian negara, tanpa bukti pertanggungjawaban dan penyimpangan pengelolaan aset dengan total kerugian negara mencapai Rp. 852,6 milyar.

Persoalan lainnya, komersialisasi pendidikan semakin marak, menjadi fakta penting tentang adanya *Konsep Sekolah Nasional Plus*, adalah istilah yang digunakan oleh sekolah secara sepihak untuk menunjukkan kepada publik adanya sekolah yang menawarkan fasilitas, kurikulum yang berbeda dari sekolah swasta lainnya untuk menjaring konsumen pendidikan. Bayangkan, dalam sekolah nasional plus ini orang tua harus membayar Rp 46.000.000,00 untuk satu tahun ajaran anak mereka yang duduk di bangku SLTA.

Tak hanya itu, dalam salah satu artikel edisi ini disebutkan institusi pendidikan hanya menjadikan anak-anak masuk dalam pabrik ujian (pabrik testing) yang nyatanya gagal meningkatkan kualitas pendidikan. Ujian Nasional dan tes-tes sejenisnya mengingkari keberagaman potensi anak. Padahal sesuai kodratnya anak memiliki karakter, kecenderungan, minat, mimpi, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tes semacam ini disebut merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Sistem penilaian seperti ini juga cenderung menyingkirkan anak-anak yang dianggap tidak pandai. Padahal pendidikan seharusnya bersifat inklusif bukan eksklusif. Pendidikan harus merangkul semua anak,

termasuk anak-anak yang marginal secara intelektual maupun sosial, secara fisik maupun mental, karena tidak ada landasan etis untuk membinasakan atau mengenyahkan seorang anak dari masyarakat hanya karena ia cacat atau “kurang cerdas”. Sekolah harus dikembalikan fungsinya sebagai institusi sosial untuk pendidikan bukan sebagai pabrik testing. Artikel-artikel lainnya juga menyebutkan perilaku negatif murid-murid di sekolah justru muncul akibat dari tertutupnya ruang-ruang untuk menyatakan pendapat dan mengekspresikan kebutuhan mereka sebagai pelajar akan pendidikan yang berkualitas.

Pada akhirnya seluruh artikel dalam Jurnal perempuan edisi ini memotret bahwa apabila pendidikan nasional tidak memaksimalkan perannya sebagaimana semangat para pendidik kita dahulu di jaman pra kemerdekaan, maka efeknya akan muncul masyarakat yang tidak berkeadilan sosial, tidak bisa memecahkan problem hidupnya, masyarakat yang sarat dengan kekerasan, tidak berguna atau tidak bisa mencipta keadaan yang lebih baik, mudah ditipu, atau dibohongi seperti yang terjadi pada korban-korban perdagangan manusia yang rata-rata perempuan belia yang tidak punya latar belakang pendidikan yang baik. Atau bagaimana kasus kekerasan terhadap buruh migran Indonesia (terutama perempuan) yang ditandai dengan tingginya tingkat kematian dan penganiayaan yang dialami buruh migran Indonesia (terutama di kawasan Timur Tengah, Malaysia dan Singapura) adalah gambaran demografi buruh migran Indonesia dengan mayoritas perempuan, yang selama ini menjalani hidup dalam tingkat ekonomi yang pas-pasan dan berada pada tingkat pendidikan yang rendah bahkan buta huruf.

Dalam Kaukus masyarakat sipil di Confintea VI secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan orang dewasa dan orang muda merupakan kunci bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat dunia. Atas dasar inilah Jurnal Perempuan edisi ‘Pendidikan Untuk Semua’ ingin memberikan sumbangan berarti bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara negara tentang pentingnya dunia pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan kecerdasan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

(Mariana Amiruddin)